

Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara

Rifka Aqila Nasution

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan
Korespondensi Penulis : rifkaqiilanst@gmail.com

Sarma Juliana Silaban

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan
Email: sharmasilaban@gmail.com

Zaskya Humairah

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan
Email: zaskyahumairah@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine and analyze the effect of government spending, unemployment and inflation on poverty in North Sumatra Province. This study uses secondary data taken from the BPS of North Sumatra Province for the observation years 1991-2020. This study uses multiple linear regression analysis with the ordinary least squares (OLS) method. The assumption test used is the normality test, autocorrelation test, multicollinearity and heteroscedasticity test. The results of this study examine the partial effect, simultaneous effect and the coefficient of determination. All data processing in this research uses the Eviews 9 analysis tool. From the results of this study it is known that: 1) Government spending has a negative and significant effect on poverty in North Sumatra Province, 2) Unemployment has a positive and significant effect on poverty in North Sumatra Province, 3) Inflation positive and significant effect on poverty in North Sumatra Province.*

Keywords: *Poverty, Government Spending, Unemployment, and Inflation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Provinsi Sumatera Utara tahun amatan 1991-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode ordinary least square (OLS). Adapun uji asumsi yang digunakan yakni uji normalitas, uji autokolerasi, multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini mengkaji pengaruh parsial, pengaruh simultan dan koefisien determinasi. Seluruh pengolahan data penelitian ini menggunakan alat analisis Eviews 9. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, 2) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, 3) Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Inflasi

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian dan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Karena ketika kemiskinan hanya disentuh dan berusaha diselesaikan oleh segelintir pihak tanpa adanya koordinasi yang baik, hal itu menjadi sangat berat dan terasa tidak mudah.

Menurut Maipita (2014) “kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai”. Kondisi masyarakat dapat dikatakan miskin jika pendapatan/pengeluaran dibawah angka garis kemiskinan. Menurut Melbourne Institute (2012) garis kemiskinan dapat diartikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan seserang dibawah tingkat tersebut, maka ia digolongkan miskin.

Tentunya ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu negara salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Filmer & Pritchett (1997), Fan & Thorat (2000), Dollar & Kraay (2001), Bigsten & Levin (2001), Fan & Rao (2004), Laabas & Liman (2004) , dan Klasen (2005) memperoleh hasil penelitian jenis pengeluaran pemerintah yang diidentifikasi mempunyai pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi dan transfer.

Selain masalah pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi juga ditenggarai menjadi pemicu meningkatnya angka kemiskinan. Menurut Todaro (2000), sebagian besar pengangguran adalah merupakan kelompok masyarakat paling miskin, yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang bekerja secara musiman. Namun tidak setiap orang yang tidak bekerja pasti miskin, selalu saja ditemukan pengangguran sukarela di negara berkembang, yaitu yang dengan mudah dapat memperoleh pekerjaan yang baik, tapi memilih menganggur karena jenis pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan, kualifikasi kecakapan, aspirasi pribadi, target finansial maupun standar gengsi.

Menurut Mankiw (2003) kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan, ketika laju inflasi bergulir dan nilai mata uang riil berfluktuasi sangat besar, maka inflasi yang meningkat pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan garis kemiskinan sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin, bila tidak diikuti oleh peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Tidak hanya terjadi di level Indonesia, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan tentunya juga terjadi di level Provinsi khususnya Provinsi Sumatera Utara. Berikut data perkembangan kemiskinan, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi di Provinsi Sumatera Utara tahun amatan 1991-2020:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 1991-2020

Tahun	Kemiskinan	Pegeluaran Pemerintah	Pengangguran	Inflasi
1991	1,353,736	336.90	115,316	8.99
1992	1,342,638	383.20	196,815	4.56
1993	1,331,631	458.70	236,376	9.75
1994	1,298,325	515.60	277,673	6.78
1995	1,265,851	584.00	320,787	10.54
1996	1,234,194	660.80	302,877	8.88
1997	1,775,321	771.00	252,220	13.1
1998	3,550,642	342.50	353,467	83.5
1999	1,972,700	449.00	326,520	1.37
2000	1,883,890	416.80	335,729	12.5
2001	1,913,040	916.20	229,212	14.79
2002	1,883,890	1,021.30	355,504	9.59
2003	1,889,400	1,352.00	404,117	4.23
2004	1,800,100	1,501.50	758,092	6.8
2005	1,760,228	1,830.60	636,980	22.41
2006	1,979,702	2,184.70	632,049	6.11
2007	1,770,000	2,560.70	571,334	6.6
2008	1,630,000	2,967.30	554,539	10.72
2009	1,500,000	3,444.56	532,427	2.61
2010	1,490,000	3,666.70	491,806	8
2011	1,436,400	4,611.47	402,125	3.67
2012	1,400,400	7,633.63	379,982	3.86
2013	1,416,400	7,260.47	412,202	10.18
2014	1,360,600	7,808.56	390,712	8.17
2015	1,508,140	7,959.17	428,794	3.34
2016	1,452,600	9,476.42	371,680	6.34
2017	1,326,600	12,518.86	377,288	3.2
2018	1,291,900	12,563.39	396,027	1.23
2019	1,260,500	13,440.32	382,438	2.33
2020	1,356,700	12,653.60	507,805	1.96

Sumber : BPS Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diamati bahwa data penduduk miskin, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara cenderung berfluktuasi. Fluktuasinya jumlah penduduk miskin ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya. Ada banyak faktor yang diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin tersebut. Salah satu variabel yang kerap dikaitkan dengan peningkatan penduduk miskin adalah pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah bisa meningkat karena adanya peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat yang menerima layanan, peningkatan penyediaan (supply) layanan pemerintah dari para penerima layanan, dan meningkatnya ketidak efisienan pemberian pelayanan.

Selain masalah pengeluaran pemerintah, variabel yang kerap dikaitkan dengan peningkatan penduduk miskin adalah pengangguran. Menurut Arsyad (2016) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang sedang mencari kerja, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran disebabkan dari selisih tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat.

Kajian yang mengaitkan antara pengangguran dengan kemiskinan sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori pengangguran memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti sebelumnya Primandari (2018), dan Mardiatillah dkk (2019). Namun ternyata hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset peneliti lainnya, Endrayani dan Dewi (2016) dan Susanto dkk (2017) menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Serta hasil penelitian Amalia (2012), Hastin dan Siswadi (2021) yang menyatakan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan pengangguran dengan kemiskinan khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Selain pengeluaran pemerintah dan pengangguran, variabel yang kerap dikaitkan dengan peningkatan penduduk miskin adalah inflasi. Menurut Sukirno (2006) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Akibat buruk yang paling nyata dari inflasi ialah kemerosotan pendapatan riil yang diterima masyarakat. Pendapatan pekerja-pekerja tidak selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan inflasi. Dengan demikian inflasi akan menurunkan pendapatan riil dari pekerja-pekerja berpendapatan tetap.

Kajian yang mengaitkan antara inflasi dengan kemiskinan sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori inflasi berdampak positif pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Endrayani dan Dewi (2016), dan Ningsih dan Andiny (2018). Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan hasil riset lainnya, Amalia (2012) dan Susanto dkk (2017) menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Serta hasil penelitian Hastin dan Siswadhi (2021) yang menyatakan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tentunya kesenjangan hasil riset ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan inflasi dengan kemiskinan khususnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi tentunya mampu mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara. Pengeluaran pemerintah yang tinggi diharapkan mampu membuka dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya menekan angka kemiskinan. Jika tingkat pengangguran di suatu negara yang relatif tinggi, cenderung akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin harus terus dapat ditekan agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata dan semakin meningkat setiap tahunnya.

KAJIAN TEORITIS

a. Kemiskinan

Menurut Maipita (2014) kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan dan kesehatan.

Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi dibedakan menjadi 2 pendekatan yakni pendekatan ekonomi dan pendekatan sosio-antropologi (non-ekonomi) khususnya tentang budaya masyarakat. Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat. Disisi lain, pendekatan sosio-

antropologi menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural) (Maipita, 2014).

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk (Suryawati, 2005) yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja;
- 2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan;
- 3) Kemiskinan kultura, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar;
- 4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

b. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh belanja pemerintah. Semakin besar kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GNP), yakni ukuran yang kasar mengenai peran pemerintah dalam suatu perekonomian. (Suparmoko, 2000)

Belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan dan memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah (pusat-provinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir-proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa

hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. (Lee dan Johnson, 1998).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. (Sadono Sukirno, 2000).

Menurut Sadono Sukirno (2006 : 168) salah satu penentu pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering kali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat maka pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti ini memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya, sehingga untuk memperoleh dana yang diperlukan pemerintah terpaksa meminjam dan mencetak.

c. Pengangguran

Menurut Sukirno (2006) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Hal senada juga diungkapkan Sumarsono (2009) pengangguran adalah seseorang atau lebih yang berada dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau secara aktif sedang dalam pencarian pekerjaan.

Menurut Sukirno (2013) terdapat 3 kelompok angkatan kerja berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utiliation approach*), antara lain: a) menganggur (*Unemployed*) yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, b) Setengah menganggur (*Underemployed*) yaitu mereka yang bekerja

tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, c) Bekerja penuh (*Employed*) yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

Menurut Sukirno (2004) jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

- 1) Pengangguran normal atau friksional adalah jenis pengangguran yang disebabkan penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.
- 2) Pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang disebabkan merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat didalam perekonomian dibanding penawaran agregatnya.
- 3) Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.
- 4) Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

d. Inflasi

Menurut Nopirin (2016) proses kenaikan harga t harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga t harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu.

Secara garis besar teori yang membahas tentang inflasi dapat dibagi dalam tiga kelompok dengan masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Ketiga teori inflasi menurut Boediono (2005) dijelaskan sebagai berikut:

1) Teori Kuantitas

Teori ini dikenalkan oleh Irving Fisher, menurut teori ini inflasi terjadi karena adanya pengaruh dari banyaknya jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga.

2) Teori Keynes

Dalam teori Keynes, inflasi terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang hidup diluar dari batas ekonominya, sehingga permintaan masyarakat terhadap suatu barang akan melebihi jumlah yang tersedia. Biasanya masyarakat dalam golongan ini akan mengusahakan untuk memperoleh dana tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga segala bentuk keinginan dapat terpenuhi.

3) Teori Strukturalis

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yakni ketidak elastisan penerimaan ekspor dan ketidak elastisan dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dimana pembahasan dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel seperti: kemiskinan, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Adapun data yang digunakan adalah data *time series* selama 30 tahun, mulai dari tahun 1991-2020.

Untuk itu, fungsi-fungsi yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3).....(1)$$

Dari persamaan 1, dispesifikasikan kedalam model dan ditransformasikan kedalam bentuk logaritma pada persamaan sebagai berikut:

$$L(PMISK) = \theta_0 - \theta_1 L(PGLRN) + \theta_2 L(PGGRN) + \theta_3 INFL + \epsilon.....(2)$$

Keterangan:

- PMISKN = Penduduk Miskin
- PGLRN = Pengeluaran Pemerintah
- PGGRN = Pengangguran
- INFL = Inflasi
- L = Logaritma
- θ_0 = Konstanta
- θ_1 - θ_2 - θ_3 = Koefisien Regresi
- ϵ = Variabel Gangguan (*error term*)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *ordinary least square* (OLS). Adapun uji asumsi yang digunakan yakni uji normalitas, uji autokolerasi, multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil penelitian ini mengkaji pengaruh parsial, pengaruh simultan dan koefisien determinasi. Seluruh pengolahan data penelitian ini menggunakan alat analisis Eviews 9.

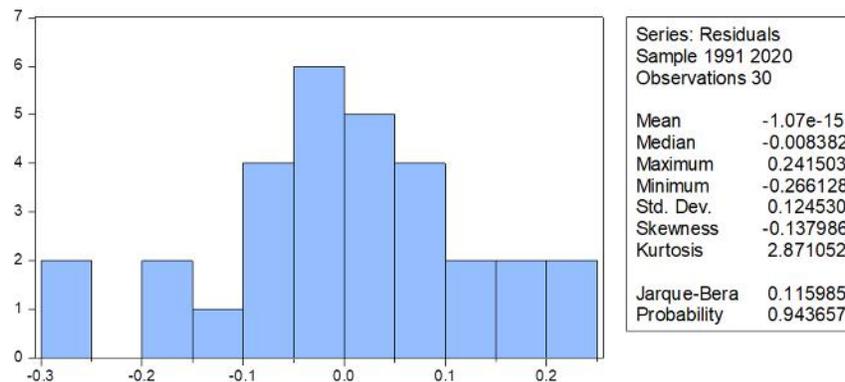
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

1). Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data di Olah Eviews 9, 2023

Uji normalitas dengan kriteria nilai Prob. Jarque-bera (JB) > 0,05 artinya H_0 diterima berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau pengganggu/residual terdistribusi secara normal. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa Prob. Jarque Bera sebesar $0,9436 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada uji normalitas dalam model penelitian ini.

b) Uji Autokolerasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.094965	Prob. F(2,23)	0.3514
Obs*R-squared	2.521165	Prob. Chi-Square(2)	0.2835

Sumber : Data di Olah Eviews 9, 2023

Uji autokolerasi breusch-godfrey serial correlation LM Test dengan kriteria jika nilai prob. $F(2,23) > 0,05$, maka tidak terjadi gejala autokolerasi pada penelitian. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa Prob. Sebesar 0,3514 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada uji autokolerasi dalam model penelitian ini.

c) Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.771445	1337.999	NA
LOG(PGLRN)	0.000598	61.83047	1.648153
LOG(PGGRN)	0.005683	1623.188	1.421040
INFL	3.34E-06	1.768343	1.203459

Sumber : Data di Olah Eviews 9, 2023

Uji Multikolinearitas pada variance inflation factors dengan kriteria jika nilai Centered VIF < 10 , maka tidak terjadi masalah uji multikolinearitas pada model penelitian. Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai Centered VIF dari semua variabel independen < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada uji multikolinearitas pada penelitian ini.

d) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	4.529923	Prob. F(3,26)	0.0110
Obs*R-squared	10.29794	Prob. Chi-Square(3)	0.0162
Scaled explained SS	7.236198	Prob. Chi-Square(3)	0.0647

Sumber : Data di Olah Eviews 9, 2023

Uji heteroskedastisitas pada hasil breusch-pagan-godfrey dengan kriteria jika nilai prob. $Obs * R\text{-squared} > 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa Prob. sebesar $0,0162 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada uji heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

2). Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji T)

Tabel 6. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.62748	0.878320	13.23833	0.0000
LOG(PGLRN)	-0.062789	0.024457	-2.567289	0.0164
LOG(PGGRN)	0.236033	0.075383	3.131102	0.0043
INFL	0.009232	0.001828	5.049328	0.0000

Sumber : Data di Olah Eviews 9, 2023

1. Pengujian pengaruh pengeluaran pemerintah (X1) terhadap kemiskinan (Y)
Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat nilai t prob pengeluaran pemerintah sebesar $0,0164 < (0,05)$ maka H_a diterima. Itu artinya secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengujian pengaruh pengangguran (X2) terhadap kemiskinan (Y)
Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat nilai t prob pengangguran sebesar $0,0043 < (0,05)$ maka H_a diterima. Itu artinya secara parsial pengeluaran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Pengujian pengaruh inflasi (X3) terhadap kemiskinan (Y)
Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat nilai t prob inflasi sebesar $0,0000 < (0,05)$ maka H_a diterima. Itu artinya secara parsial inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

b) Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	18.09388
Prob(F-statistic)	0.000002

Tabel 7. Hasil Uji f

Dari hasil uji F, ditemukan bahwa nilai F Probabilitas ialah sebesar $0,000002 < 0,05$ maka H_a diterima. Yang berarti variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

c) Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil R²

Adjusted R-squared	0.638772
--------------------	----------

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared (koefisien determinasi) sebesar 0.638772. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen pengeluaran pemerintah (X1), pengangguran (X2) dan inflasi (X3) kemiskinan variabel dependen (Y) memberikan pengaruh sebesar 63% dan sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

d) Pembahasan Model Analisis

Adapun persamaan regresi yang dihasilkan dari model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$L(\text{PMISK}) = 11.62748 - 0.062789 L(\text{PGLRN}) + 0.236033 L(\text{PGGRN}) + 0.009232 \text{INFL} + \varepsilon$$

Berdasarkan koefisien di atas, maka dapat di jelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta b_0 sebesar 11.62748 menunjukkan bahwa jika variabel bebas seperti pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi adalah konstan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 11.62748 %.
2. Nilai koefisien b_1 sebesar -0.062789 berdasarkan uji t diketahui variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Yang dimaksud disini ialah apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.062789 % dan begitupun sebaliknya apabila terjadi penurunan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen maka akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.062789 %.
3. Nilai koefisien b_2 sebesar 0.236033 berdasarkan uji t diketahui variabel pengangguran di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Yang dimaksud disini ialah apabila terjadi kenaikan pengangguran sebesar satu persen maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.236033 % dan begitupun

- sebaliknya apabila terjadi penurunan pengangguran sebesar satu persen maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.236033 %.
4. Nilai koefisien b_3 sebesar 0.009232 berdasarkan uji t diketahui variabel inflasi di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Yang dimaksud disini ialah apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar satu persen maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.009232 % dan begitupun sebaliknya apabila terjadi penurunan inflasi sebesar satu persen maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.009232 %.

2. Pembahasan

a). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, artinya hipotesis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara teruji kebenarannya. Ini mengartikan bahwa sebagian besar masyarakat yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara telah dapat mengakses pembangunan dengan cukup baik. Hal ini juga disebabkan pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari usaha pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Indrianti Sulistria Ningsing dkk (2022) yaitu bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka akan searah dengan turunnya kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sukirno (2004) yang menyatakan pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat ekonomi negara.

Berbagai pendapat para ahli dan hasil studi empiris penelitian ini semakin meyakinkan dan menguatkan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah, maka semakin menurunnya tingkat kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah.

b). Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, artinya hipotesis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Primandari (2018), dan Mardiatillah dkk (2019). Hasil penelitian ini menguatkan pendapat Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa salah satu sumber kemiskinan adalah pengangguran. Hal ini bisa dipahami, tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja maka akan menciptakan pengangguran. Semakin tingginya biaya hidup setiap hari, tidak adanya pekerjaan tentunya akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup yang tidak layak karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukirno (2004) menyatakan bahwa pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berbagai pendapat para ahli dan hasil studi empiris penelitian ini semakin meyakinkan dan menguatkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah.

c). Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, artinya hipotesis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Endrayani dan Dewi (2016), Ningsih dan Andiny (2018), Primandari (2018), Mardiatillah dkk (2019) dan Indrianti Sulistria Ningsing dkk (2022). Banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa salah satu faktor utama kemiskinan adalah inflasi. Kenaikan harga terus menerus akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga daya beli masyarakat rendah. Ketika daya beli yang rendah, maka tingkat konsumsi masyarakat juga rendah. Rendahnya daya beli dan tingkat konsumsi ini akan berpengaruh besar pada menurunnya tingkat kesejahteraan untuk pemenuhan standar hidup layak. Tentunya jika meningkat harga kebutuhan pokok maka akan menaikkan garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Hal ini diperkuat dari pendapat Mankiw(2003) bahwa kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan. Ketika laju inflasi bergulir dan nilai mata uang riil berfluktuasi sangat besar, maka inflasi yang meningkat pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan batas garis kemiskinan sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin.

Berbagai pendapat para ahli dan hasil studi empiris penelitian ini semakin meyakinkan dan menguatkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah, Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan nilai koefisien sebesar -0.062789 dan uji t dengan prob sebesar 0.0164 . Situasi ini dapat memperlihatkan kenaikan pengeluaran pemerintah mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga sejalan dengan landasan teori dan hipotesis yang dipakai pada penelitian ini, dimana pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka akan searah dengan turunnya kemiskinan. Sedangkan Pengangguran dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar $63,87\%$. Sedangkan variabel yang paling dominan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara adalah pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran penelitian ini adalah signifikannya pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin mendesak pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk lebih bisa menghidupkan iklim investasi, mendatangkan investor dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar dari peningkatan jumlah angkatan kerja. Pembukaan lapangan kerja yang lebih mempertimbangkan industri padat karya agar penyerapan tenaga dari kelompok penganggura semakin optimal.

Bagi masyarakat, peneliti berharap masyarakat lebih bisa memanfaatkan lagi seluruh pengeluaran pemerintah seperti fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah setempat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan diharapkan mampu memanfaatkan lapangan pekerjaan yang ada agar mampu mengurangi kemiskinan.

Pemerintah melalui bank Indonesia perlu melakukan usaha ketat untuk menstabilkan inflasi yang ada. Selain itu, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara juga turut andil dalam mengawasi dan mengendalikan distribusi barang khususnya kebutuhan pokok (sembako) agar harga kebutuhan pokok tersebut lebih stabil.

Kepada peneliti yang akan datang, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah industri dan lain sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, Fitri. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. *Econo Sains*. Vol. X (2), 2012.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bigsten, A. & Levin, J. (2001). Growth, Income Distribution and Poverty. *Working Paper in Economic*.
- Boediono. 2005. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
- Dollar, D. & Kraay, A. (2001). Trade, Growth and Poverty. *Development Research Group, The World Bank*.
- Fan, S. Zang & Rao, N. (2004). Public Investment, Growth and Rural Poverty. Public Expenditures, Growth and Poverty: Lesson From Developing Countries. Hal. 56-108. *International Food Policy Research Institute*.
- Fan, S., Hazell, P. & Thorat, S. (2000). Government Spending, Growth and Poverty in Rural India. *Amer. J. Agr. Econ.* 82 (4) (November 2000): 1038-1051. *American Agriculturl Economics Assosiation*.
- Filmer, D. & Pritchett, L. (1997). The Impact of Public Spending of Health: Does Money Metter?. *Social Sience & Madicine*. 49:1309-1323.
- Hastin, M. dan Siswadhi, F. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sakti*. Vol. 10 (1),2021.
- Sulistia, Indrianti & Bustamam, Nawarti. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *SIMBA*. September 2022
- Klasen. (2005). Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues. *OECD Development Centre*. Working Paper No.246.
- Laabas & Limam. (2004). Impact of Public Policies on Poverty, Income Distribution and Growth. *Arab Planning Institute*.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiatillah, R. Panorama, M., Sumantri, R. (2019). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2015-2019. *Kinerja*.
- Melbourne Institute. (2012). *Poverty Line: Australia, March Quarter 2012*. Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research The University of Melbourne.

Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)

Vol.2, No.2 Mei 2023

e-ISSN: 2963-7643; p-ISSN: 2963-8194, Hal 206-225

- Ningsih, D. dan Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol. 2 (1), April 2018.
- Nopirin. 2016. *Ekonomi Moneter*. Buku 2. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Primandari (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 16 (1): 1-10, Juni 2018.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multimidensial. *JMPK*. Vol.8(3).
- Susanto, E., Rochaida, E., Ulfah, Y. (2017). Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Inovasi*. Vol. 13(1), 2017, 119-27.
- Ttodoro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.